

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan secara terus menerus guna meningkatkan pendapatan perkapita yang terus berlangsung dalam jangka panjang, sehingga taraf kehidupan masyarakat akan meningkat (Lincoln Arsyad, 1980)

Pembangunan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pembangunan daerah merupakan upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional di daerah dengan masalah, potensi, aspirasi dan prioritas masyarakat daerah.

Pembangunan nasional dan daerah yang selama ini telah dilaksanakan mendapat suatu ujian yang sangat berat karena adanya krisis kepercayaan, ekonomi dan social politik (multi dimensi) yang terjadi selama beberapa tahun ini. Pembangunan yang terpusat dan tidak merata yang dilaksanakan selama ini ternyata hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi serta tidak diimbangi kehidupan social, politik, ekonomi yang demokratis dan berkeadilan. Fundamental pembangunan ekonomi yang rapuh, penyelenggaraan negara yang sangat birokratis dengan penyalahgunaan serta tidak demokratis menjadi penyebab timbulnya krisis nasional berkepanjangan yang berdampak pada pembangunan daerah. Penyeragaman pembangunan diseluruh tanah air yang

diakibatkan oleh arahan yang terlalu terpusat telah melemahkan daya tahan nasional dan daerah.

Pembangunan nasional perlu mendapatkan dukungan dari pembangunan daerah dan perlu kerjasama yang terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pembangunan nasional benar-benar akan terlaksana secara terarah, terpadu dan efisien. Seiring dengan tuntutan reformasi yang bertujuan mengadakan perbaikan dan penyempurnaan disegala bidang, maka kebijaksanaan pokok-pokok reformasi pembangunan didaerah ditekankan pada pelaksanaan paradigma pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) yang menempatkan manusia sebagai manusia (*human is human*) yang dilakukan dengan mengembangkan kapasitas dan kemampuan para pelaku pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan melihat kondisi seperti itu maka pembangunan disegala bidang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat terus selalu ditingkatkan.

Untuk melaksanakan pembangunan, banyak sektor yang perlu dipertimbangkan antara lain sektor sumber daya manusia dan faktor dana yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Dalam kaitannya dengan sumber dana, ada suatu dana yang sangat penting peranannya dalam pelaksanaan pembangunan yaitu dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan yang utama bagi pelaksanaan pembangunan dan sebagai penerimaan rutin didalam anggaran APBD serta sebagai komponen utama dalam penerimaan daerah yang terdiri

dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi bagi daerah sebagai input untuk memajukan pembangunan daerah tersebut.

Kabupaten Jepara merupakan daerah yang sedang membangun. Tentu saja usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu dukungan dari pemerintah dan swasta. Pihak swasta dengan investasi di daerah, sedangkan pemerintah melaksanakan pembangunan dengan dukungan dana APBD. Sebagai sumber utama APBD adalah PAD. Dengan perkembangan PAD Kabupaten Jepara dari tahun 2000 sebesar 19.970.486.166,0 naik sebesar 43.740.237.824,0 pada tahun 2003. Itu mencerminkan adanya peningkatan PAD yang berarti pembangunan di Kabupaten Jepara berkembang.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Karena dana ini adalah milik Pemerintah sendiri, sehingga Pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut. Di pihak lain Pemerintah Daerah juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap pengelolaan keuangan yang berasal masyarakat setempat untuk mendapatkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembangunan. Untuk mendukung peningkatan PAD, maka diperlukan kebijakan dari pemerintah daerah yang bersangkutan agar pelaksanaannya menjadi terarah dan terpadu, sehingga tujuan akhir dalam pemanfaatan PAD untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat

tercapai sesuai dengan yang diharapkan yaitu kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat didaerah tersebut.

Dalam peningkatan pendapatan daerah, dinas pendapatan daerah kabupaten Jepara mempunyai peranan yang sangat penting dalam menggali dan mengkoordinasi pemungutan sumber-sumber PAD yang dikelola, baik oleh dipenda kabupaten jepara maupun yang dikelola oleh instansi diluar dipenda. Dipenda senantiasa dituntut untuk terus meningkatkan kemampuannya dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah yang akan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jepara.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis mencoba mengetahui seberapa besar pengaruh Jumlah penduduk, pendapatan perkapita, jumlah pelayanan kesehatan dan inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara. Hal ini dianggap perlu karena dengan mengetahuinya maka akan bisa digunakan oleh para pengambil kebijakan dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara. Berdasarkan uraian di atas penulis mengambil judul :

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN JEPARA PERIODE  
TAHUN 1983 – 2003.**

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap PAD Kabupaten Jepara ?
2. Bagaimanakah pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap PAD Kabupaten Jepara ?
3. Bagaimanakah pengaruh Jumlah Pelayanan Kesehatan terhadap PAD Kabupaten Jepara ?
4. Bagaimanakah Pengaruh Inflasi terhadap PAD Kabupaten Jepara ?

**C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD Kabupaten Jepara
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap PAD Kabupaten Jepara
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Jumlah Pelayanan Kesehatan terhadap PAD Kabupaten Jepara ?
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Inflasi terhadap PAD Kabupaten Jepara ?

**D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi PAD kabupaten Jepara

## 2. Bagi Akademisi

Sebagai bahan perbandingan dengan penelitian lain yang masih berhubungan dengan penelitian ini

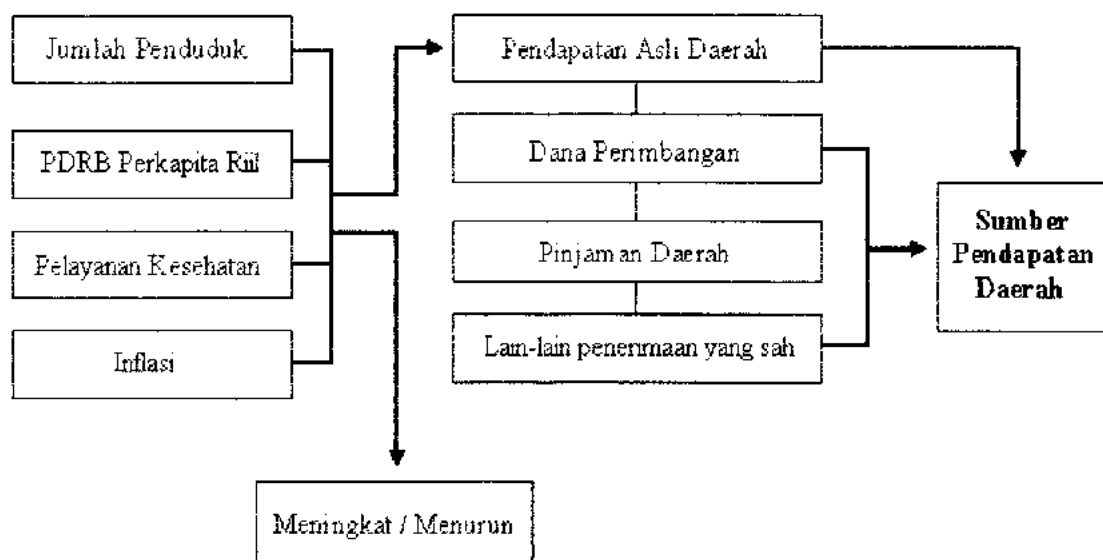
## 3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan kinerja dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara

## 4. Bagi pihak lain

Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara

### E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 .  
Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran diatas dijelaskan bahwa Pendapatan Asli daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah kabupaten jepara berasal dari jumlah penduduk, pendapatan perkapita, Jumlah Pelayanan Kesehatan dan inflasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Ruang lingkup penelitian**

Ruang lingkup dari penelitian ini meliputi wilayah Kabupaten Jepara dengan kurun waktu 1983 – 2003

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan berupa data sekunder, yang diperoleh melalui instansi terkait yaitu dari Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jepara, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Jepara, serta dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan penelitian.

### **3. Definisi operasional variabel.**

#### **a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah (Strisn PH, 1981).

Sedangkan menurut UU No.25/1999 Pasal 4, PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah

(Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dinyatakan dalam rupiah.

b. Jumlah Penduduk

Merupakan keseluruhan penduduk Kabupaten Jepara yang tercatat pada akhir tahun yang dinyatakan dalam jiwa

c. Pendapatan Perkapita

Pendapatan Perkapita adalah tingkat pendapatan masyarakat Kabupaten Jepara pada tahun tertentu yang dinyatakan dalam rupiah

d. Jumlah Pelayanan Kesehatan

Merupakan jumlah keseluruhan tempat pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Jepara yang meliputi jumlah puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan rumah sakit umum daerah yang dinyatakan dalam satuan unit pertahun.

e. Laju inflasi

Kecenderungan harga barang-barang naik secara umum dan terus menerus, yang dinyatakan dalam persen per tahun.

4. Teknik penganalisaan data

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka penelitian ini menggunakan model persamaan regresi non linier sebagai berikut :

$$\text{Log } Y = \beta_0 + \beta_1 \text{ Log } X_1 + \beta_2 \text{ Log } X_2 + \beta_3 \text{ Log } X_3 + \beta_4 \text{ Log } X_4 + U_e$$



Dimana,

Y : Pendapatan Asli Daerah (PAD) ( rupiah per tahun )

X1 : Jumlah Penduduk ( jiwa per tahun )

X2 : Pendapatan Perkapita ( rupiah per tahun )

X3 : Jumlah Pelayanan Kesehatan ( unit per tahun )

X4 : Inflasi ( % per tahun )

$\beta_0$  : Konstanta

$U_e$  : Variabel pengganggu

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  : Koefisien regresi

Selanjutnya dilakukan proses pengolahan data dengan bantuan komputer dalam paket E-views, sedangkan operasi regresi menggunakan *Ordinary Least Square (OLS)*.

Kemudian bentuk pengujian yang dilakukan adalah :

**a) Uji statistik**

◆ **Uji koefisien regresi secara individu (Uji-t)**

Uji t atau student test adalah uji secara sendiri-sendiri semua koefisien regresi.

Hipotesis :  $H_0 : \beta_i \leq 0$

$H_a : \beta_i > 0$

t tabel  $\rightarrow t_{\alpha; n-k}$

t hitung  $\rightarrow t_{stat}$

$i = 1, 2, 3 \text{ dan } 4$

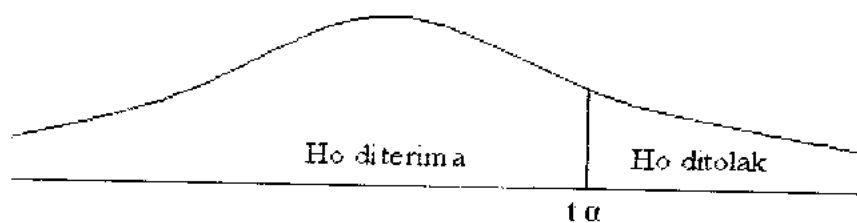
dimana :

$\alpha$  : derajat signifikansi

$n$  : jumlah sampel

$k$  : banyaknya koefisien regresi ditambah konstanta

$\beta_i$  : koefisien regresi



Gambar 1.2 .  
Percobaan untuk uji-t

- Jika  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak artinya variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
- Jika  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya variabel independen mempengaruhi variabel variabel dependen secara signifikan.

#### ◆ Uji Koefisien Regresi Secara Bersama (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Caranya adalah sebagai berikut :

➤ Menentukan Hipotesis :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$$

➤ Melakukan penghitungan nilai F hitung :

$$* F \text{ tabel} \rightarrow F_{\alpha; (n-k); (k-1)}$$

Dimana :

$\alpha$  = derajat signifikansi

$n$  = jumlah data

$k$  = jumlah parameter dalam model termasuk konstanta

$$* F \text{ hitung} = F \text{ statistik}$$

Apabila  $F \text{ hit} < F \text{ tabel}$  , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.  
Maka dapat dikatakan bahwa secara statistik semua koefisien regresi secara bersama-sama tidak signifikan pada taraf  $\alpha$ .

Apabila  $F \text{ hit} > F \text{ tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.  
Maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa secara statistik semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu Y

◆ **Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

$R^2$  = koefisien determinasi adalah untuk mengetahui berapa % variabel dependen (Y) dapat dijelaskan oleh variasi variabel independennya (X1, X2, X3, X4).

**b) Uji Asumsi Klasik/ Uji Ekonometrika**

◆ **Multikolinearitas**

Multikolinearitas adalah keadaan dimana satu atau lebih variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi dari variabel independen lainnya atau dengan kata lain variabel independen yang satu merupakan fungsi dari variabel-variabel independen yang lainnya, akibatnya akan menghasilkan estimasi yang tidak valid, untuk mengujinya maka digunakan cara mencari korelasi matrik dari masing-masing variabel penjelas.

◆ **Heteroskedastisitas**

Heteroskedastisitas terjadi jika gangguan muncul dalam fungsi regresi yang mempunyai varian yang tidak sama sehingga penaksir OLS tidak efisien baik dalam sampel kecil maupun sampel besar (tapi masih tetap tidak bias dan konsisten).

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam model, salah satu caranya adalah dengan menggunakan *uji park*. Yang caranya sebagai berikut :

- i. Melakukan regresi dengan menggunakan model empiris
- ii. Dari hasil regresi tersebut (i) akan diperoleh nilai residualnya
- iii. Nilai residual tersebut dikuadratkan atau dimutlakkan, lalu diregresi dengan variabel bebasnya sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$\text{Log } Y_i = \beta_0 + \beta_1 \text{Log } X_1 + \beta_2 \text{Log } X_2 + \beta_3 \text{Log } X_3 + \beta_4 \text{Log } X_4$$

- iv. Hasil regresi tahap kedua dilakukan uji t

Bila hasilnya signifikan, maka terjadi masalah heteroskedastisitas. Sedangkan jika tidak signifikan, maka tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model tersebut.

#### ◆ Autokorelasi

Autokorelasi adalah adanya korelasi antara variabel gangguan sehingga penaksir tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun dalam sampel besar. Atau dapat juga dikatakan terjadinya korelasi serial diantara error term variabel pengganggu serangkaian sampel dalam suatu model. Salah satu pengujian terhadap gejala autokorelasi dilakukan dengan menggunakan angka *Durbin-Watson*. Kemudian dibandingkan dengan angka DW dalam tabel dengan  $\alpha$  tertentu. Angka dalam tabel menunjukkan nilai distribusi antara batas bawah dan batas atas.

- $H_0$  ditolak jika  $d < d_l$  dan  $d > 4 - d_l$  dan  $H_a$  diterima jika  $d < d_l$  dan  $d > 4 - d_l$

- $H_0$  di terima jika  $d > d_u$  dan  $d < 4 - d_u$  dan  $H_a$  ditolak jika  $d > d_u$  dan  $d < 4 - d_u$
- $H_0$  dan  $H_a$  berada pada ketidakpastian jika  $d_l \leq d \leq d_u$  dan  $4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$

Menolak $H_0$ bukti Autokorela si	Daerah keragu- raguan	Menerima $H_0$ tidak ada Autokorelasi	Daerah keragu- raguan	Menolak $H_0$ bukti Autokore lasi
0	$d_l$	$d_u$	$4 - d_u$	$4 - d_l$

Tabel 1.1

Percobaan Durbin-Watson

### G. Sistematika Penulisan

#### BAB I      Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan

#### BAB II      Kajian Pustaka

Bab ini berisi kajian pustaka hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

#### BAB III      Landasan Teori

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti dan hipotesis penelitian.

**BAB IV            Gambaran Umum Subyek Penelitian**

Bab ini berisi mengenai Bab ini menguraikan tentang gambaran umum mengenai kondisi dari berbagai aspek seperti letak dan luas monografi, keadaan ekonomi, penduduk serta ketenagakerjaan

**BAB V             Analisis Data dan Pembahasan**

Bab ini memuat tentang apa yang telah dibahas pada bab terdahulu dan analisis dari hasil penelitian.

**BAB VI            Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan**

Bab ini berisikan kesimpulan yang telah diambil dari tulisan yang dibuat. dan Implikasi Kebijakan yang dikemukakan oleh penulis terhadap hasil yang dibuat.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan yang utama bagi pelaksanaan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi bagi daerah sebagai input untuk memajukan pembangunan daerah tersebut.

Penelitian mengenai faktor yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pernah dilakukan sebelumnya oleh :

#### 1. Nugroho Afriyanto (2001)

Studi yang pernah dilakukan dengan judul yaitu : ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN DATI II KLATEN PERIODE TAHUN 1983/1984 – 1999/2000. dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor PDRB perkapita dan Investasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan faktor wisatawan domestik dan Industri besar & sedang tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah.

Dalam penelitian tersebut, data yang digunakan adalah data tahunan (*time series*) antara tahun 1983/1984-1999/2000.

Dari hasil pengolahan dengan computer diperoleh koefisien regresi sebagai berikut :

- PDRB perkapita : 0,7576600
- Wisatawan Domestik : 0,386460



- Industri besar dan sedang : 0,1551123
- Investasi : 0,2566124

Dari hasil regresi tersebut, maka dapat kita tarik kesimpulan, bahwa :

- a. PDRB perkapita berpengaruh secara positif terhadap PAD Kabupaten Klaten. Apabila PDRB perkapita naik sebesar 1%, maka PAD naik sebesar 0,75%
- b. Wisatawan Domestik sedang belum memberikan sumbangan yang signifikan terhadap PAD Kabupaten Klaten. Karena beberapa obyek wisata dengan pengunjung yang cukup besar jumlahnya tidak dipungut bea masuk, dimana hal itu sebagai salah satu sumber pendapatan daerah
- c. Industri besar dan sedang belum memberikan sumbangan yang signifikan terhadap PAD Kabupaten Klaten.
- d. Investasi berpengaruh secara positif terhadap PAD Kabupaten Klaten. Apabila Investasi naik sebesar 1%, maka PAD naik sebesar 0,26%

## 2. Kusuma A.S Pamungkas (1996)

Studi yang pernah dilakukan dengan judul yaitu : ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN DATI II SRAGEN DAN FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA TAHUN 1984/1985 – 1993/1994, menyimpulkan bahwa dari hasil estimasi menunjukkan pendapatan perkapita dengan koefisien regresi sebesar 22,4823 serta nilai t hitung  $2,020 > 1,94$  dan jumlah penduduk dengan koefisien regresi sebesar 49,9844 serta nilai t hitung

$2,4902 > 1,94$  maka secara statistic kedua variabel tersebut berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sragen.

### 3. Heri Praptadi ( 2001 )

Studi yang pernah dilakukan dengan judul yaitu : ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 1980 - 1998. dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor Jumlah Penduduk, PDRB dan Inflasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dalam penelitian tersebut, data yang digunakan adalah data tahunan (*time series*) antara tahun 1983/1984-1999/2000.

Dari hasil pengolahan dengan komputer diperoleh koefisien regresi sebagai berikut :

- Jumlah Penduduk : 2,6937845
- PDRB perkapita : 3,4128794
- Inflasi : -0,0976648

Dari hasil regresi tersebut, maka dapat kita tarik kesimpulan, bahwa :

- a. Jumlah Penduduk berpengaruh secara positif terhadap PAD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila Jumlah Penduduk perkapita naik sebesar 1%, maka PAD naik sebesar 2,7%

- b. PDRB perkapita berpengaruh secara positif terhadap PAD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila PDRB perkapita naik sebesar 1%, maka PAD naik sebesar 3,4%
- c. Inflasi perkapita berpengaruh secara negatif terhadap PAD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila Inflasi perkapita naik sebesar 1%, maka PAD turun sebesar 0,1%

#### **4. Ricky Wahyu Prastowo (2001)**

Studi yang pernah dilakukan dengan judul yaitu : ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DAN PERANANNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 1990 – 2000 menyimpulkan bahwa dari hasil estimasi menunjukkan jumlah penduduk dengan koefisien regresi sebesar 3,721 serta nilai t hitung  $2,526 > 1,833$  dan PDRB dengan koefisien regresi sebesar 0,699 serta nilai t hitung  $5,183 > 1,833$  maka secara statistik kedua variabel tersebut berpengaruh positif terhadap penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Dati II Wonogiri., itu berarti peningkatan retribusi pasar akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

## **BAB III**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pembangunan Daerah**

##### **1. Pengertian Pembangunan Daerah**

Pembangunan Daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada (sumber daya ekonomi dan non ekonomi) dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara local (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses. Yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternative, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-

pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenisnya untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. (Lincoln Arsyad, 1999).

## **2. Corak Pembangunan Daerah**

Perbedaan kondisi daerah membawa implikasi bahwa corak pembangunan yang diterapkan berbeda pula, peniruan mentah-mentah pola kebijaksanaan yang pernah diterapkan dan berhasil pada suatu daerah belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah lainnya. Jika akan membangun suatu daerah, kebijakan yang diambil harus sesuai dengan kondisi (masalah, kebutuhan dan potensi) daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam tentang keadaan tiap daerah harus dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna bagi penentu perencanaan pembangunan daerah yang bersangkutan (Lincoln Arsyad, 1999).

Menurut UU No.22 tahun 1999 penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Menurut UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintah di daerah didasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

a. Asas Desentralisasi

Yang dimaksud asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wewenang yang telah diserahkan dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa dan kehendak sepenuhnya diserahkan kepada daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan maupun yang menyangkut lembaga perencanaan adalah perangkat daerah itu sendiri.

b. Asas Dekonsentrasi

Pengertian dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil kepala dan/atau perangkat

pusat di daerah. Dalam pelaksanaannya tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada daerah. Menurut asas desentralisasi, maka penyelenggaraan berbagai urusan pemerintah di daerah dilaksanakan oleh pemerintah di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan-urusan yang diserahkan oleh pemerintah kepada pejabatnya di daerah menurut asas dekonsentrasi ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, baik mengenai perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan maupun pengawasannya. Untuk pelaksanaan dalam hal ini adalah instansi-instansi vertikal yang dikoordinir oleh pemerintah daerah, akan tetapi kebijaksanaan terhadap pelaksanaan urusan dekonsentrasi sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat. Adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat di daerah memunculkan pemerintah daerah yang bersifat administratif wilayah. Administratif itu sendiri adalah wilayah kerja gubernur selaku wakil pemerintah atau lingkungan kerja perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan secara umum di daerah.

c. Tugas Pembantuan

Pengertian tugas pembantuan adalah penguasaan dari pemerintah pusat kepada daerah ke desa-desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya

dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Dalam pelaksanaannya tidak semua urusan rumah tangganya. Ada beberapa urusan masih tetap merupakan urusan pemerintah pusat. Namun karena terbatasnya kemampuan masih menjadi tanggung jawabnya itu berdasarkan asas dekonsentrasi, maka tugas tersebut menjadi terasa berat.

### **3. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Daerah**

Peran pemerintah yang dapat diambil oleh pemerintah dalam proses pembangunan daerah yaitu sebagai entrepreneur, coordinator, fasilitator, dan simulator bagi lahirnya inisiatif-inisiatif pembangunan daerah (Lincoln Arsyad, 1999).

#### **a. Entrepreneur**

Dengan peranannya sebagai entrepreneur, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah bisa mengembangkan suatu usaha sendiri (BUMD). Aset-aset pemerintah daerah harus dapat dikelola dengan lebih baik sehingga secara ekonomis menguntungkan.

#### **b. Koordinator**

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perluasan dari peranan ini dalam pembangunan ekonomi bisa melibatkan kelompok-kelompok dalam



masyarakat dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian informasi ekonomi, misalnya tingkat kesempatan kerja, angkatan kerja, penggunaan dan sebagainya.

Dalam peranaannya sebagai koordinator, pemerintah daerah bisa juga melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha dan masyarakat dalam penyusunan sasaran ekonomi, rencana-rencana dan strategi-strategi. Pendekatan ini sangat potensial dalam menjaga konsistensi pembangunan daerah dengan nasional (pusat) dan menjamin bahwa perekonomian daerah akan mendapatkan manfaat yang maksimum daripadanya.

c. Fasilitator

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan *attitudinal* didaerahnya. Hal ini akan mempercepat proses pembangunan dari prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah (*zoning*) yang lebih baik.

d. Stimulator

Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah tersebut. Stimulasi ini dapat dilakukan dengan cara antara lain: pembuatan brosur-brosur, pembangunan kawasan industri,

pembuatan *outlets* untuk produk-produk industri kecil, membantu industri- industri kecil untuk melakukan pameran.

#### 4. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Daerah

Saat ini tidak ada suatu teoripun yang mampu untuk menjelaskan pembangunan ekonomidaerah secara komprehensif. Namun demikian, ada beberapa teori secara parsial yang dapat membantu kita untuk memahami arti penting pembangunan ekonomi daerah. Pada hakekatnya, inti dari teori-teori tersebut berkisar pada dua hal, yaitu pembahasan yang berkisar tentang metoda dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang factor-yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu.

Pengembangan metoda yang menganalisis perekonomian suatu daerah penting sekali kegunaannya untuk mengumpulkan data tentang perekonomian daerah yang bersangkutan serta proses pertumbuhannya, yang kemudian dapat dipakai sebagai pedoman untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil untuk mempercepat laju pertumbuhan yang ada. Namun di pihak lain harus diakui, menganalisis perekonomian suatu daerah sangat sulit karena (Lincoln Arsyad, 1999) :

- Data tentang daerah sangat terbatas terutama kalau daerah dibedakan berdasarkan daerah nodal. Dengan data yang sangat terbatas sangat sukar untuk menggunakan metoda yang telah dikembangkan dalam memberikan gambaran mengenai perekonomian suatu daerah.

- Data yang tersedia umumnya tidak sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk menganalisis daerah, karena data yang terkumpul biasanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan menganalisis perekonomian secara nasional.
- Data tentang perekonomian daerah sangat sukar dikumpulkan, sebab perekonomian daerah lebih terbuka dibandingkan dengan perekonomian nasional. Hal tersebut menyebabkan data tentang aliran-aliran yang masuk dan keluar dari suatu daerah sukar diperoleh.
- Bagi Negara yang sedang berkembang, disamping kekurangan data sebagai kenyataan yang umum, data yang ada yang terbatas itu pun banyak yang sulit dipercaya, sehingga menimbulkan kesulitan untuk melakukan analisis yang memadai tentang keadaan perekonomian suatu daerah.

**a. Teori Neo Klasik**

Peranan teori ekonomi Neo Klasik tidak terlalu besar dalam menganalisis pembangunan daerah (regional) karena teori ini tidak memiliki dimensi spasial yang signifikan. Namun demikian, teori ini memberikan 2 konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan alamiahnya jika modal bisa mengalir tanpa restriksi (pembatasan). Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju ke daerah yang berupah rendah (Lincoln Arsyad, 1999).

**b. Teori Basis Ekonomi (*Economic Basic Theory*)**

Tori basis ekonomi ini menyatakan bahwa factor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (*job creation*).

Strategi pembangunan daerah yang muncul yang didasarkan pada teori ini adalah penekanan terhadap arti penting bantuan (*aid*) kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun internasional. Implementasi kebijakannya mencakup pengurangan hambatan/batasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang ada dan akan didirikan di daerah tersebut.

Kelemahan model ini adalah bahwa model ini didasarkan pada permintaan eksternal bukan internal. Pada akhirnya akan menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun secara global. Namun demikian, model ini sangat berguna untuk menentukan keseimbangan antara jenis-jenis industri dan sektor yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan stabilitas ekonomi (Lincoln Arsyad, 1999).

### c. Teori Lokasi

Para ekonomi regional sering mengatakan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan daerah yaitu : lokasi, lokasi dan lokasi! Pernyataan tersebut sangat masuk akal jika dikaitkan dengan pengembangan kawasan industri. Perusahaan cenderung untuk meminimumkan biaya dengan cara memilih lokasi yang memaksimalkan peluangnya untuk mendekati pasar. Model pengembangan industri kuno menyatakan bahwa lokasi yang terbaik adalah biaya yang termurah antara bahan baku dengan pasar.

Tentu saja banyak variabel lainnya yang mempengaruhi kualitas atau suitability suatu lokasi misalnya upah tenaga kerja, biaya energi, ketersediaan pemasok, komunikasi, fasilitas-fasilitas pendidikan dan latihan (diklat), kualitas pemerintah daerah dan tanggungjawabnya dan sanitasi. Perusahaan-perusahaan yang berbeda membutuhkan kombinasi-kombinasi yang berbeda pula atas factor-factor tersebut. Oleh karena itu, sering kali masyarakat berusaha untuk memanipulasi biaya dari factor-factor tersebut untuk menarik perusahaan-perusahaan industri.

Keterbatasan dari teori lokasi ini pada saat sekarang adalah bahwa teknologi komunikasi modern telah mengubah signifikansi suatu lokasi tertentu untuk kegiatan produksi dan distribusi barang (Lincoln Arsyad, 1999).

#### **d. Teori Tempat Sentral**

Teori tempat sentral (*central place theory*) menganggap bahwa ada hirarki tempat (*hierarchy of places*). Setiap sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumberdaya (industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya.

Teori tempat sentral ini bisa diterapkan pada pembangunan ekonomidaerah, baik didaerah perkotaan maupun di pedesaan. Misalnya, perlunya melakukan perbedaan fungsi antara daerah-daerah yang bertetangga (berbatasan). Beberapa daerah bisa menjadi wilayah penyedia jasa sedangkan daerah lainnya hanya sebagai daerah pemukiman. Seorang ahli pembangunan ekonomi daerah dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan peranan fungsional mereka dalam sistem ekonomi daerah (Lincoln Arsyad, 1999).

#### **e. Toeri Kausasi Kumulatif**

Kondisi daerah-daerah sekitar kota yang semakin buruk menunjukkan konsep dasar dari tesis kausasi kumulatif (*cumulative causation*) ini. Kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperoleh kesenjangan antara daerah-daerah tersebut (maju versus terbelakang). Daerah yang maju mengalami akumulasi keunggulan kompetitif dibanding daerah-daerah lainnya (Lincoln Arsyad, 1999).

**f. Model Daya Tarik (*Attraction*)**

Teori daya tarik industri adalah model pembangunan ekonomi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Teori ekonomi yang mendasarinya adalah bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialis melalui pemberian subsidi dan intensif (Lincoln Arsyad, 1999).

**5. Paradigma Baru Teori Pembangunan Ekonomi Daerah**

Teori pembangunan yang ada sekarang ini tidak meampu untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara tuntas dan komprehensif. Oleh karena itu, suatu pendekatan alternative terhadap teori pembangunan dirumuskan disini untuk kepentingan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Pendekatan ini merupakan sintesa dan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada. Pendekatan ini memberikan dasar bagi kerangka piker dan rencana tindakan yang akan diambil dalam konteks pembangunan ekonomi daerah (Lincoln Arsyad, 1999). Pendekatan ini dapat disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.1  
Paradigma Baru Teori Pembangunan Ekonmi Daerah

KOMPONEN	KONSEP LAMA	KONSEP BARU
Kesempatan Kerja	Semakin banyak perusahaan = semakin banyak peluang kerja	Perusahaan harus Mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan "kondisi" penduduk daerah
Basis Pembangunan	Pembangunan sektor ekonomi	Pengembangan lembaga-lembaga ekonmi baru
Aset-aset Lokasi	Keunggulan Komparatif didasarkan pada asset fisik	Keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitaslingkungan
Sumberdaya pengetahuan	Ketersediaan Angkatan Kerja	Pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi

## B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

### 1. Pengertian PAD

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah (Strisno PH, 1981). Dapat dikatakan bahwa PAD merupakan pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangannya untuk membiayai tugas-tugas dan tanggungjawabnya.

Sedangkan menurut UU No.25/1999 Pasal 4, PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya



sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Sumber-sumber pendapatan Daerah**

### **a. Menurut UU No.5 tahun 1974**

Salah satu criteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah *self-supporting* dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya.

Menurut UU No.5 tahun 1974. Sumber-sumber pendapatan daerah adalah :

- a. Pendapatan Asli Daerah Sendiri ( PADS ), yang terdiri dari :
  1. Hasil Pajak Daerah
  2. Hasil Retribusi Daerah
  3. Hasil Perusahaan Daerah
  4. Lain-lain hasil usaha daerah yang sah
- b. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri dari :
  1. Sumbangan dari Pemerintah
  2. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Lain-lain pendapatan yang sah

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka pendapatan dapat dibedakan kedalam dua jenis yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Pendapatan non-asli daerah

**b. Menurut UU No.25 tahun 1999**

Menurut UU No. 25 tahun 1999, pembiayaan desentralisasi dilakukan melalui kombinasi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan lain yang sah. Pada dasarnya, daerah akan menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien apabila PAD cukup tinggi, sehingga leluasa dan mandiri menentukan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat setempat.

Secara rinci, sumber-sumber pendapatan daerah dapat dijelaskan lebih lanjut :

Dalam pasal 4, UU No.25 tentang dana perimbangan keuangan daerah antara pusat dan daerah, PAD terdiri dari :

**1. Pajak Daerah**

Pajak merupakan sumber pendapatan yang utama untuk membiayai pemerintah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang dihasilkan oleh swasta. Pajak disamping sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama juga berperan sebagai alat pengatur (*regulatory function*) (Suparmoko, 2001).

Pajak daerah merupakan salah satu unsur PAD yang mencakup pajak asli daerah dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara, yang pengelolaan dan pengenaannya diserahkan kepada daerah. Sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan daerah tanpa imbalan langsung seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **2. Retribusi Daerah**

Disamping pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar perannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Dibeberapa daerah pendapatan yang berasal dari retribusi daerah dapat lebih besar daripada pendapatan dari pajak daerah.

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah dari pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Suparmoko, 2001). Jadi dalam hal retribusi daerah balas jasa dari adanya retribusi daerah tersebut langsung dapat ditunjuk. Misalnya retribusi jalan, karena kendaraan tertentu memang melalui jalan dimana retribusi jalan tersebut dipungut. Juga retribusi pasar dibayar karena ada penggunaan ruangan pasar tertentu oleh si

pembayar tersebut. Demikian juga retribusi parkir karena ada pemakaian ruangan tertentu oleh si pemakai tempat parkir. Selain itu retribusi pelayanan kesehatan juga dibayarkan karena si pembayar tersebut menggunakan jasa pelayanan kesehatan yang telah disediakan. Jadi sesungguhnya dalam hal pemungutan iuran retribusi itu dianut asas manfaat (*benefit principles*). Dalam asas ini besarnya pemungutan ditentukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh si penerima manfaat dari pelayanan yang diberikan pemerintah. Namun yang menjadi persoalan ialah dalam menentukan berapa besar manfaat yang diterima oleh orang yang membayar retribusi tersebut dan menentukan berapa besar pungutan yang harus dibayarnya.

Pada prinsipnya pungutan retribusi yang harus dibayar oleh si penerima manfaat harus sama dengan nilai manfaat yang diterimanya. Tetapi bagaimana menilai manfaat yang diterima oleh pembayar retribusi itu? Untuk menilai manfaat harus ditempuh melalui beberapa langkah, yaitu: a) pertama diidentifikasi manfaat fisik yang dapat diukur besarnya; b) kemudian diterapkan nilai rupiahnya dengan cara menggunakan harga pasar, atau harga barang pengganti, atau dengan mengadakan survey tentang kesediaan membayar (*willing ness to pay*).

Pungutan retribusi daerah yang berkembang selama ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang

Peraturan Retribusi Daerah, yang ternyata menunjukkan beberapa kelemahan diantaranya :

- Hasilnya kurang memadai bila dibandingkan dengan biaya penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah
- Biaya pemungutan terlalu tinggi
- Kurang kuatnya prinsip dasar retribusi terutama dalam hal pengenaan, penetapan, struktur dan besarnya tariff retribusi
- Ada beberapa jenis retribusi yang pada hakikatnya bersifat sebagai pajak karena pemungutannya tidak dikaitkan langsung dengan balas jasa atau pelayanan pemerintah daerah yang diterima oleh pembayar retribusi
- Ada jenis retribusi perijinan yang tidak efektif dalam kaitannya dengan usaha untuk melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.

Oleh karena itu maka pada 1997 Pemerintah merasa perlu untuk mengklarifikasikan berbagai pungutan retribusi itu atas dasar criteria tertentu agar memudahkan penerapan prinsip-prinsip dasar pungutan retribusi sehingga mencerminkan hubungna yang jelas antara tariff retribusi dengan pelayanan atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Banyak jenis retribusi, tapi dapat dikelompokkan menjadi tiga macam sesuai dengan obyeknya. Obyek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Namun tidak semua jenis pelayanan dapat dipungut retribusinya. Jasa pelayanan yang dapat dipungut retribusinya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang menurut pertimbangan social-ekonomi layak untuk dijadikan obyek retribusi. Jasa-jasa pelayanan tersebut diantaranya dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Retribusi yang dikenakan pada jasa umum
- b. Retribusi yang dikenakan pada jasa usaha
- c. Retribusi yang dikenakan pada perijinan tertentu

Penetapan jenis retribusi ke dalam retribusi jasa usaha dibuat dengan Peraturan Pemerintah agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian pada masyarakat serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata di daerah yang bersangkutan. Demikian pula untuk beberapa jenis perijinan tertentu juga ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah karena perijinan tersebut walaupun merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, tetap memerlukan koordinasi dengan instansi-instansi teknis terkait. Sebagai contoh pemberian IMB memerlukan koordinasi dengan Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah (KIMPRASWIL) dengan Kantor Menteri Megara Lingkungan Hidup.

#### ➤ **Retribusi Jasa Umum**

Dalam menetapkan jenis retribusi ke dalam kelompok retribusi jasa umum, criteria yang digunakan adalah bahwa :

- a. Jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam pelaksanaan atas desentralisasi
- b. Selain melayani kepentingan umum, jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, misalnya pelayanan pemungutan dan pembuangan sampah
- c. Jasa tersebut dianggap layak jika hanya disediakan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi, seperti pelayanan kesehatan untuk seseorang yang mampu (memiliki penghasilan yang cukup)
- d. Retribusi untuk pelayanan pemerintah daerah itu tidak bertentangan dengan kebijaksanaan nasional
- e. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta dapat merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial
- f. Pelayanan yang bersangkutan dapat disediakan secara baik dengan kualitas pelayanan yang memadai.

Adapun yang termasuk dalam pelayanan umum antara lain:

1. *Pelayanan Kesehatan*. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan *pelayanan*

*kesehatan* adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan dan Rumah Sakit umum Daerah

2. *Pelayanan kebersihan dan persampahan.* Yang dimaksud dengan *pelayanan persampahan/kebersihan* meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, sampah industri dan sampah perdagangan-perdagangan; tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan/tempat umum.
3. *penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk (KTP) dan akta cataatan sipil.* Yang dimaksud dengan akte catatan sipil meliputi akte kelahiran, akte perkawinan, akte perceraian, akte pengesahan dan pengakuan anak, akte ganti nama bagi warga negara asing dan akte kematian
4. *Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.* Yang termasuk dalam pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi penguburan atau pemakaman atau penguburan/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
5. *Pelayanan parker ditepi jalan umum.* Yang dimaksud dengan pelayanan parker ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parker di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.



6. *Pelayanan Pasar.* Yang dimaksud dengan pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa pelataran atau los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar
7. *Pelayanan air bersih.* Yang dimaksud dengan pelayanan air bersih adalah pelayanan penyediaan fasilitas air bersih yang dimiliki atau dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
8. *Pengujian kendaraan bermotor.* Pelayanan pengujian kendaraan bermotor meliputi pelayanan pemeriksaan kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
9. *Pemeriksaan alat pemadam kebakaran.* Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki atau dipergunakan oleh masyarakat
10. *Penggantian ablaya cetak peta yang dibuat Pemerintah Daerah.*
11. *Pengujian kapal perikanan;* yaitu pengujian terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Retribusi jasa umum ini disamping sebagai sumber pendapatan daerah, juga dapat digunakan sebagai alat pengatur. Misalnya untuk daerah yang padat lalu lintasnya. Demikian pula untuk menjamin pemerataan beban riil suatu pungutan, Pemerintah Daerah dapat mengenakan tarif tinggi untuk rawat inap di rumah sakit daerah dengan kelas kamar I atau kelas II dan lebih rendah untuk kelas III dan seterusnya. Juga untuk retribusi sampah bagi masyarakat yang lebih mampu dapat dikenakan lebih tinggi daripada retribusi sampah bagi masyarakat yang kurang mampu.

➤ **Retribusi Jasa Usaha**

Adapun yang dimaksud dengan jasa atau pelayanan usaha harus memenuhi criteria sebagai berikut:

- a. Jasa tersebut harus bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh swasta, tetapi pelayanan sektor swasta dianggap belum memadai dan
- b. Harus terdapat harta yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Daerah dan belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah seperti tanah, bangunan dan alat-alat berat.

Jadi yang menjadi obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh swasta.

Secara rinci jasa-jasa usaha dapat disebutkan sebagai berikut:

1. *Pemakaian kekayaan daerah.* Retribusi pemakaian kekayaan daerah dikenakan atas pemakaian kekayaan daerah seperti pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan atau alat-alat berat milik Pemerintah Daerah.
2. *Pasar grosir dan pertokoan.* Yang dimaksud dengan pasar grosir dan pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Perusahaan daerah Pasar atau pihak swasta.
3. *Pelayanan terminal.* Yang dimaksud dengan pelayanan terminal adalah penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
4. *Pelayanan tempat khusus parkir.* Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah daerah.

5. *pelayanan tempat penitipan anak.* Yang dimaksud tempat pelayanan penitipan anak adalah penyediaan tempat penitipan anak yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
6. *Penginapan/pesanggrahan vila.* Yang dimaksud penginapan/pesanggrahan/vila adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. *Penyedotan kakus.* Yang dimaksud dengan pelayanan penyedotan kakus adalah pelayanan penyedotan kakus atau jamban yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
8. *Rumah potong hewan.* Pelayanan rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. *Tempat pendaratan kapal.* Pelayanan tempat pendaratan kapal adalah pelayanan pada tempat pendaratan kapal ikan dan atau bukan kapal ikan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. *Tempat rekreasi dan olah raga.* Pelayanan tempat rekreasi dan olah raga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. *Penyebrangan diatas air.* Pelayanan penyebrangan diatas air adalah pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan

menggunakan kendaraan diatas air yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

12. *Pengolahan air limbah.* Yang dimaksud dengan pelayanan pengolahan air limbah adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah.

13. *Penjualan usaha produksi daerah.* Yang dimaksud dengan penjualan usaha produksi daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah seperti bibit tanaman, bibit ternak, dan bibit ikan.

Untuk retribusi jasa usaha ini juga dapat berfungsi ganda sebagai sumber pendapatan daerah dan juga sebagai alat pengatur. Kegiatan usaha yang kurang dikehendaki oleh Pemerintah Daerah dapat dikenakan tariff retribusi yang relative lebih mahal daripada kegiatan usaha yang ingin didorong perkembangannya oleh Pemerintah Daerah. Seperti untuk usaha penjual minuman keras dapat dikenakan tariff retribusi yang tinggi; sedangkan kepada usaha pengolahan limbah cair dapat dikenakan tariff retribusi yang lebih rendah atau bahkan dapat diberi subsidi oleh pemerintah Daerah.

### ➤ **Retribusi perijinan**

Seperti halnya dengan pajak, retribusi perijinan juga mempunyai peranan ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai alat pengatur. Lebih tepatnya retribusi perijinan dapat digunakan sebagai instrument untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, maupun untuk pengawasan disamping sebagai sumber pendapatan daerah.

Adapun biaya penyelenggaraan pemberian ijin itu meliputi penerbitan dokumen ijin, pengawasan dan pengendalian di lapangan serta penetausahaan.

Oleh karena itu dapat berarti bahwa perijinan oleh Pemerintah Daerah tidak harus dikenakan retribusi. Namun demikian karena untuk melaksanakan fungsinya sebagai lembaga yang mengatur dan mengarahkan kegiatan dalam perekonomian, Pemerintah Daerah mengalami kekurangan dana, maka dirasa perlu adanya pungutan yang harus dibayar pada saat ijin diberikan oleh Pemerintah Daerah. Disamping itu memang masyarakat perlu diberikan ijin oleh Pemerintah Daerah. Disamping itu memang masyarakat perlu diberikan peraturan perundang-undangan untuk mendukung atau memberikan kekuatan hukum terhadap perijinan yang diberikan. Hal ini seperti halnya dengan cambuk (*stick*) untuk keperluan memaksa agar mereka mendapatkan ijin mentaati peraturan dan melakukan kegiatan dengan baik. Tetapi eseringkali

juga orang juga lebih takut (tidak mau) untuk melakukan pembayaran daripada menjalani hukuman fisik (dikenakan hukuman penjara misalnya) sehingga pembayaran retribusi sebagai alat intensif ekonomi (*economic intensives*) agar orang tidak melakukan kegiatan ekonomi dan maupun kegiatan lainnya sesuka hati mereka di luar ketentuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Semakin kegiatan itu harus dikurangi keberadaannya dalam masyarakat, maka dapat juga pungutan retribusi perijinan itu dikenakan tariff semakin tinggi.

Perijinan tertentu yang dapat dipungut retribusinya antara lain adalah (perppu No.20 tahun 1997) :

1. *Ijin peruntukan penggunaan tanah*. Yang dimaksud dengan ijin pembentukan tanah adalah pemberian ijin atas penggunaan tanah kepada badan usaha yang akan menggunakan tanah seluas 5000 meter atau lebih yang dikaitkan dengan rencana tata ruang daerah yang bersangkutan.
2. *Ijin mendirikan bangunan (IMB)*. Pelayanan ijin bangunan adalah pemberian ijin untuk mendirikan sebuah bangunan. Termasuk dalam pemberian ijin itu adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku, serta pengawasan penggunaan bangunan

yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

3. *Ijin tempat penjualan minuman beralkohol.* Ijin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pelayanan pemberian ijin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu di lingkungan tertentu di wilayah kekuasaan Pemerintah Daerah.
4. *Ijin gangguan.* Ijin gangguan merupakan pelayanan pemberian ijin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
5. *Ijin trayek.* Ijin trayek ini merupakan pelayanan pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu trayek tertentu.
6. *Ijin pengambilan hasil hutan.* Ijin pengambilan hasil hutan ikutan merupakan pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha pengambilan hasil hutan ikutan, antara lain: dammar, rotan, gaharu, tidak termasuk pengambilan kayu hutan.

Pengajuan ijin tertentu oleh badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tetap dikenakan retribusi karena badan-badan itu merupakan kekayaan negara atau kekayaan



daerah yang dipisahkan. Pengajuan ijin oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak dikenakan retribusi perijinan tertentu.

### **C. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

#### **a. Pengertian PDRB**

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Dengan demikian PDRB secara agregatif menunjukkan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan lebih lanjut, perkembangan PDRB antara lain mencerminkan struktur ekonomi suatu daerah sekaligus memberikan gambaran kesejahteraan masyarakat dan kemampuan daerah untuk menggali serta memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.

Perhitungan PDRB dapat dilakukan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu waktu tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat

digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun. Ada 3 macam pendekatan PDRB, yaitu :

1. Pendekatan Produksi, PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan berbagai unit produksi dalam suatu wilayah / region pada suatu jangka waktu tertentu, biasanya setahun.
2. Pendekatan Pendapatan, PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut dalam proses produksi dalam suatu wilayah / region pada jangka waktu tertentu (setahun). Balas jasa factor produksi tersebut adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak tak langsung lainnya.
3. Pendekatan Pengeluaran, PDRB adalah jumlah semua pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal domestic bruto, perubahan stok dan ekspor neto di suatu wilayah/region. Ekspor neto disini adalah ekspor dikurangi neto.

Secara konsep, ketiga pendekatan tersebut memberikan jumlah yang sama antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk factor-faktor produksinya. PDRB diatas selanjutnya disebut PDRB atas dasar harga pasar, karena masyarakat mencakup komponen pajak tak langsung neto.

**b. Produk Domestik Regional Netto**

Produk Domestik Regional Netto merupakan Produk Regional Bruto dikurangi dengan penyusutan modal tetap yang digunakan selama setahun. Jika dikurangi dengan pajak tak langsung netto akan diperoleh Produk Domestik Regional Netto atas biaya factor produksi. Pajak tak langsung netto adalah pajak tak langsung dikurangi subsidi pemerintah. Pajak tak langsung bersifat menaikkan harga jumlah, sedangkan subsidi sebaliknya.

Selanjutnya Produk Regional Netto atas dasar biaya factor disebut Pendapatan Regional. Pendapatan Regional inilah yang seharusnya merupakan pendapatan yang benar-benar diterima oleh penduduk setempat. Akan tetapi sampai saat ini penghitungan pendapatan yang benar-benar diterima oleh penduduk daerah setempat belum dapat digunakan. Hal ini disebabkan masih belum tersedianya data arus pendapatan yang mengalir antar daerah. Dalam pengertian ini dapat dijelaskan bahwa pendapatan dari factor produksi yang berada diluar daerah milik penduduk daerah itu sendiri harus dihitung sebagai pendapatan daerah. demikian pula sebaliknya, pendapatan dari faktor produksi milik penduduk luar daerah harus dikeluarkan.

**c. Pendapatan Regional Perkapita**

Besarnya Pendapatan Perkapita sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan penduduk. Pendapatan Regional Perkapita sering dianggap

sebagai gambaran tingkat kesejahteraan penduduk, sehingga apabila pertumbuhan pendapatan regional lebih besar daripada tingkat pertumbuhan penduduk, maka pendapatan regional perkapita meningkat. Sebaliknya, apabila tingkat pertumbuhan pendapatan regional lebih kecil dari pertumbuhan penduduk, maka pendapatan regional perkapita mengalami penurunan. Untuk mempertahankan pendapatan regional perkapita atau kesejahteraan relative, perlu dicapai tingkat pertambahan pendapatan regional yang sama dengan tingkat pertambahan penduduk.

#### **D. Inflasi**

##### **a. Penertian Inflasi**

Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan dijumpai di hamper semua di dunia adalah inflasi. Definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain. Syarat adanya kecenderungan menaik secara terus-menerus juga perlu diingat. Kenaikan harga-harga karena, misalnya, musiman, menjelang hari-hari besar, atau yang terjadi sekali saja (dan tidak mempunyai pengaruh lanjutan) tidak disebut inflasi. Kenaikan harga semacam ini tidak dianggap sebagai masalah atau “penyakit” ekonomi dan tidak memerlukan kebijaksanaan khusus untuk menanggulangnya

## b. Macam Inflasi

Ada berbagai cara untuk menggolongkan macam inflasi, dan penggolongan mana yang kita pilih tergantung pada tujuan kita.

Penggolongan *pertama* didasarkan atas “parah” tidaknya inflasi tersebut. Disini dibedakan beberapa macam inflasi:

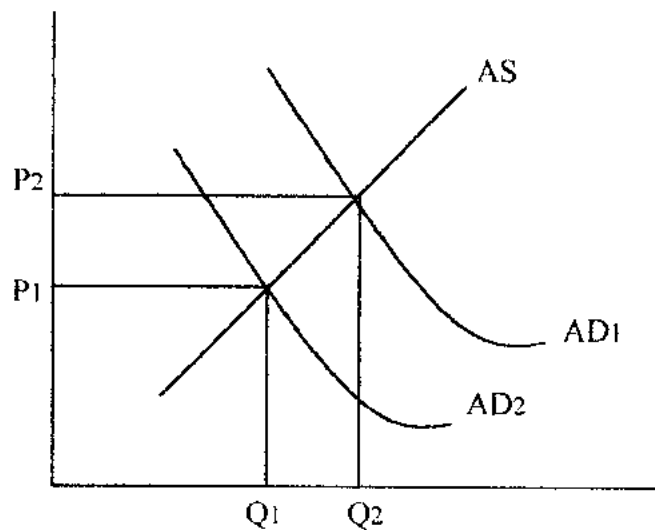
- Inflasi ringan (dibawah 10% setahun)
- Inflasi sedang (antara 10 – 30% setahun)
- Inflasi berat (antara 30 – 100% setahun)
- Hiperinflasi (diatas 100% setahun)

Penentuan parah tidaknya inflasi tentu saja sangat relative dan tergantung pada “selera” kita untuk menemukannya. Dan lagi sebetulnya kita tidak bisa menentukan parah tidaknya suatu inflasi hanya dari sudut laju inflasi saja, tanpa mempertimbangkan siapa-siapa yang menanggung beban atau yang memperoleh keuntungan dari inflasi tersebut.

Penggolongan yang kedua adalah atas dasar sebab musabab awal dari inflasi. Atas dasar ini kita bedakan dua macam inflasi :

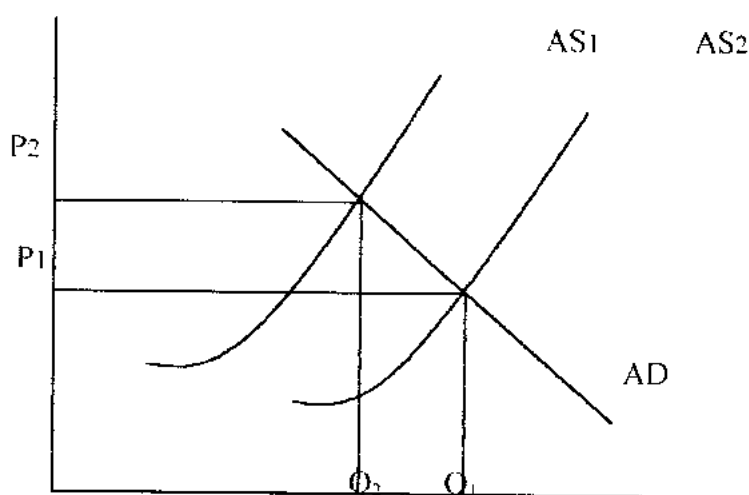
1. Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat. Inflasi semacam ini disebut *demand inflation*. Karena permintaan masyarakat akan barang-barang (aggregate demand) bertambah (mislnya, karena bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan pencetakan uang, atau kenaikan permintaan luar negeri akan barang-barang ekspor, atau bertambahnya pengeluaran investasi swasta karena kredit yang murah), maka kurva

agregat demand bergeser dari AD1 ke AD2. Akibatnya, tingkat harga umum naik dari P1 ke P2, seperti yang terlihat pada gambar 3.1



Gambar 3.1  
*Demand Inflation*

2. Inflasi yang timbul karena kenaikan ongkos produksi. Ini disebut *cost inflation*. Apabila ongkos produksi naik (misalnya, karena kenaikan harga sarana produksi yang didatangkan dari luar negeri, atau karena kenaikan harga bahan sarana produksi yang didatangkan dari luar negeri, atau kenaikan bahan bakar minyak) maka kurva penawaran masyarakat (agregat supply) bergeser dari AS1 ke AS2, seperti yang terlihat pada gambar 3.2



Gambar 3.2  
*Cost Inflation*

Perbedaan lain dari kedua proses inflasi ini terletak pada urutan dari kenaikan harga. Dalam demand inflation kenaikan harga barang akhir (output) mendahului kenaikan barang-barang input dan faktor-faktor produksi (upah dan sebagainya). Sebaliknya, dalam cost inflation kita melihat kenaikan harga barang-barang akhir (output) mengikuti kenaikan harga-harga input/faktor produksi.

## E. Pelayanan Kesehatan

### 1. Profil Kesehatan Indonesia

Upaya kesehatan di Indonesia diarahkan untuk meningkatkan mutu dan kemudahan Pelayanan Kesehatan yang semakin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat pada khususnya kelompok rentan yaitu bayi, anak,

balita, ibu hamil dan menyusui. Gambaran upaya kesehatan yang dilakukan dapat diukur dengan beberapa indikator terpilih (Depkes RI, 1997) :

- a. upaya kesehatan ibu dan anak yang meliputi cakupan pelayanan antenatal (kunjungan baru ibu hamil, cakupan pertolongan persalinan dan cakupan pelayanan neonatal)
- b. Keluarga Berencana yang mencakup peserta KB baru, disertai KB aktif dan metode kontrasepsi efektif terpilih
- c. Imunisasi bayi dan anak balita
- d. Gizi
- e. Peran serta masyarakat
- f. Pemanfaatan fasilitas kesehatan baik puskesmas atau Rumah Sakit yang menyangkut mutu pelayanan (kunjungan baru, rawat inap, rawat jalan, NDR dan GDR, dan tingkat efisiensi).

## **2. Stratifikasi Pelayanan Kesehatan**

- a. Pelayanan Kesehatan tingkat pertamam (*Primary health service*) adalah pelayanan kesehatan yang bersifat pokok yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat serta mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Pada umumnya Pelayanan Kesehatan tingkat pertama ini bersifat pelayanan rawat jalan (*out patient service*)



- b. Pelayanan Kesehatan tingkat kedua adalah pelayanan kesehatan yang lebih lanjut telah bersifat rawat inap (*in patient service*) dan untuk menyelenggarakannya telah dibutuhkan tersedianya tenaga-tenaga spesialis.
- c. Pelayanan Kesehatan tingkat ketiga (*tertiary health service*) adalah Pelayanan Kesehatan yang bersifat lebih kompleks dan umumnya diselenggarakan oleh tenaga-tenaga sub spesialis.

#### **F. Hipotesis**

Hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Diduga Jumlah penduduk berpengaruh signifikan positif terhadap PAD Kabupaten Jepara
2. Diduga Pendapatan Perkapita berpengaruh signifikan positif terhadap PAD Kabupaten Jepara.
3. Diduga Jumlah Pelayanan Kesehatan berpengaruh signifikan positif terhadap PAD Kabupaten Jepara.
4. Diduga Tingkat Laju Inflasi berpengaruh signifikan positif terhadap PAD Kabupaten Jepara.

**BAB IV**  
**GAMBARAN KEADAAN WILAYAH**  
**KABUPATEN JEPARA**

**A. Deskripsi Wilayah Kabupaten Jepara**

**1. Kondisi Demografis**

Secara administrative Kabupaten Jepara dibagi dalam 14 wilayah Kecamatan, 182 Desa dan 11 Kelurahan dengan luas 100.413.189 Ha atau 1.004.13 km persegi. Serta terletak pada posisi 3 23' 20'' sampai 4 9' 35'' bujur timur dan 5 43' 30'' sampai 6 47' 44'' lintang selatan dengan batas-batas wilayah disebelah utara berbatasan dengan laut jawa, sebelah timur dengan Pati dan Kudus, sebelah selatan dengan Kabupaten Demak dan senbelah barat berbatasan dengan Laut Jawa. Karena itu Jepara beriklim tropis dengan musim penghujan selama 4-5 bulan dan musim kemarau selama 7-8 bulan. Suhu rata-rata setiap bulan 21,55 sampai 32,71 derajat celcius denagan kelembaban rata-rata 5,87 persen.

Wilayah Kabupaten jepara juga memiliki topografi yang khas dan bervariasi dari dataran tinggi di sekitar pegunungan Muria dan Gunung Clering sampai dataran rendah serta wilayah kepulauan. Karena itu ketinggian tanahnya juga bervariasi 0 – 1.301 meter diatas permukaan laut. Bagian terendah berada disepanjang pantai diwilayah kecamatan Welahan, Kedung, Jepara, Mlonggo, Bangsri, Kembang dan Keling. Sedangkan bagian tertinggi terdapat dikaki gunung Muria diwilayah kecamatan Keling serta bagian imur Jepara lainnya yang

merupakan lereng barat gunung Muria. Dari kawasan ini mengalir sungai besar dan kecil seperti sungai mayong, Bakalan dan sungai Pecangaan. Yang ketiganya bertemu disungai serang dan bermuara di laut Jawa Jepara sebelah selatan. Kemudian juga terdapat sungai Wisu, Mambak, Mlonggo, Banjaran, Wedelan, Jinggotan, Sebangor, Keling, Pedut dan Kali Gelis yang bermuara di laut Jawa sebelah utara Jepara.

Karena letak geografisnya ini, Jepara memiliki garis pantai sepanjang 72 km membentang di 32 desa / kelurahan mulai dari perbatasan kabupaten Demak disebelah selatan hingga perbatasan Pati sebelah utara. Garis pantai ini belum termasuk Kecamatan Kepulauan Karimunjawa yang terdiri dari 27 pulau besar kecil. Luas daratan Kepulauan Karimunjawa adalah 7.120 ha dengan keringgian antara 0-506 meter dari atas permukaan laut. Sebagian besar daratan merupakan daerah hutan tropis dataran rendah. Sedangkan kawasan pantainya ditumbuhi oleh hutan bakau.

## **2. Kependudukan**

Penduduk Kabupaten Jepara dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2001 jumlah penduduk Kabupaten Jepara sebesar 984.773 jiwa, dan pada tahun 2002 naik sebesar 1.002.381 jiwa. Itu menunjukkan bawa pertumbuhan penduduk pada tahun 2002 naik sebesar 17.608 atau sebesar 1.79%. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Jepara yang paling besar dari kecamatan Mlonggo (115.596 jiwa) dan kecamatan Keling (108.179 jiwa). Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel : 4.1  
Jumlah Penduduk Menurut kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Jepara  
Tahun 2002

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kedung	31.997	32.16	64.157
2	Pecangaan	34.865	35.176	70.041
3	Kalinyamatan	25.788	26.265	52.053
4	Welahan	33.447	34.352	67.799
5	Mayong	38.024	38.804	76.822
6	Nalumsari	33.038	33.883	66.927
7	Batealit	35.375	34.68	70.055
8	Tahunan	41.844	41.111	82.967
9	Jepara	36.477	33.297	69.774
10	Mlonggo	58.503	57.093	115.596
11	Bangsri	43.019	43.146	86.165
12	Kembang	30.529	31.366	61.895
13	Keling	54.234	53.947	108.181
14	Karimun Jawa	5.015	4.934	9.949
Tahun 2002		502.155	500.214	1.002.381
Tahun 2001		494.165	490.608	984.773
Tahun 2000		483.478	485.485	968.963

Sumber: Jepara Dalam Angka.

### 3. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja yang terampil, merupakan potensi sumber daya masyarakat yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan menyongsong era globalisasi. Menurut Biri Pusat Statistik (BPS). Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang 10 tahun keatas dan dibedakan sebagai angkatan kerja dan

bukanangkatan kerja. Pertumbuhan penduduk tiap tahun akan berpengaruh terhadap pertumbuhan angkatan kerja. Berdasarkan hasil susenas, angkatan kerja kabupaten Jepara yang berumur 10 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama pada tahun 2002 adalah sebesar 510.975. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL 4.2  
PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KEATAS YANG BEKERJA  
MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA (2002)

NO	LAPANGAN PEKERJAAN	TENAGA KERJA (jiwa)
1	Pertanian	104.975
2	Pertambangan dan Galian	4.901
3	Industri	229.228
4	Konstruksi	18.419
5	Perdagangan	99.142
6	Komunikasi	13.641
7	Keuangan	1.019
8	Jasa	39.039
JUMLAH		510.364

Dari data diatas terlihat bahwa sektor Industri cukup banyak menyerap tenaga kerja sebesar 229.228 jiwa. Sektor lain yang cukup banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian dan perdagangan yang masing-masing tercatat sebesar 104.975 jiwa dan 99.142 jiwa.

#### 4. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jepara

Krisis ekonomi telah berlalu lebih dari setengah dasawarsa, namun mengembalikan keadaan perekonomian Indonesia sebagaimana sebelum krisis rupanya masih perlu lebih banyak waktu.

Sebagaimana tersaji pada tabel : 4.2 laju pertumbuhan ekonomi secara nasional sebelum krisis ekonomi (tahun 1996) sebesar 7,82%. Tahun-tahun berikutnya diwarnai gejolak, bahkan pernah merosot hingga minus 13,01%. Kini, setelah lima tahun lebih krisis ekonomi berlalu, kinerja ekonomi Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) relative stabil dengan pertumbuhan sebesar 3,66%.

Tabel : 4.2  
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI  
KABUPATEN JEPARA, PROPINSI JAWA TENGAH DAN NASIONAL  
TAHUN : 1996 – 2002 (Persen)

TAHUN	KABUPATEN JEPARA	PROPINSI JAWA TENGAH	NASIONAL
1994	7,04	6,96	7,54
1995	7,69	7,34	8,22
1996	7,31	7,30	7,82
1997	4,31	3,03	4,70
1998	0,03	-11,74	-13,01
1999	0,67	3,49	0,85
2000	4,61	3,90	4,77
2001	3,79	3,33	3,32
2002	3,69	3,44	3,66

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jepara 2002

Perkembangan perekonomian Propinsi Jawa Tengah pun tak jauh beda dengan keadaan nasional. Setelah jatuh di tahun 1998 dengan pertumbuhan minus 11,74%, pada tahun 2002 perekonomian Jawa Tengah bergerak positif sebesar 3,44%. Berbeda dengan keadaan Nasional dan Propinsi Jawa Tengah, pada tahun 1998 Kabupaten Jeparaberuntung meraup hikmah dari merosotnya nilai Rupiah terhadap uang Dollar AS. Terbukanya peluang ekspor ke Luar Negeri memicu peningkatan produksi mebel, maka terjadilah *booming* pada industri mebel. Pertumbuhan yang tinggi pada sektor ini secara agregat mampu menutup perlemahan sektor lain akibat hempasan krisis ekonomi, sehingga Kabupaten Jepara masih mampu bertahan pada pertumbuhan positif (0,03%). Tahun-tahun berikutnya semua sektor telah mampu bergerak positif dan pada tahun 2002 ini pertumbuhan ekonomi mencapai 3,69%.

## **BAB V**

### **ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Deskripsi Variabel**

Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan deskripsi dari masing-masing variabel yang diambil.

##### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah (Sutrisno PH, 1981). Dapat dikatakan bahwa PAD merupakan pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangannya untuk membiayai tugas-tugas dan tanggungjawabnya.

Sedangkan menurut UU No.25/1999 Pasal 4, PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan tabel 5.1 terlihat bahwa dari tahun ke tahun kontribusi penerimaan retribusi selalu lebih besar dibandingkan dengan penerimaan yang lain terhadap Pendapatan Asli daerah Kabupaten Jepara.

Tahun anggaran 1993/1994 – 1999/2000 penerimaan PAD berasal dari lima pos penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas dan penerimaan lain-lain. Pada tahun anggaran



2000/2001 bagian laba BUMD tidak digunakan, kemudian pada tahun anggaran berikutnya digunakan kembali. Sedangkan untuk penerimaan dinas sudah tidak digunakan lagi mulai tahun anggaran 2000/2001 sampai sekarang.

Tabel 5.1  
Realisasi Penerimaan dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 1993 -- 2002

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Bagian Laba BUMD	Penerimaan dari Dinas	Perimaan Lain-lain	Total PAD
1993/1994	345.613.905,0	2.563.422.873,0	88.091.135,0	41.453.775,0	144.000.385,0	3.182.582.073,3
1994/1995	566.153.360,0	3.097.782.227,0	112.410.571,0	41.399.500,0	242.202.331,0	3.969.947.989,0
1995/1996	801.002.755,0	3.388.560.091,0	135.413.458,0	45.044.975,0	592.842.931,0	4.962.864.210,0
1996/1997	1.947.916.345,0	6.226.093.759,0	145.745.730,0	61.059.400,0	615.542.548,0	8.996.357.782,0
1997/1998	2.040.352.590,0	7.853.811.605,0	182.857.735,0	68.856.425,0	915.289.437,0	11.061.167.792,0
1998/1999	1.777.255.170,0	10.094.304.258,0	298.336.441,0	72.456.450,0	472.996.105,0	12.715.348.424,0
1999/2000	3.647.863.259,0	10.709.811.197,0	231.399.026,0	1.110.700.050,0	714.456.955,0	16.774.290.468,0
2000/2001	6.937.600.373,0	16.050.132.892,0			5.982.752.901,0	19.970.486.166,0
2001/2002	5.078.623.369,0	13.686.011.765,0	227.275.109,0		1.107.117.733,0	23.099.327.976,0
2002/2003	6.448.437.379,0	19.585.196.459,0	505.807.479,0		4.872.306.673,0	31.411.747.990,0

Sumber : BPS Kabupaten Jepara

## 2. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk merupakan keseluruhan penduduk yang tercatat pada akhir tahun. Penduduk Kabupaten Jepara hingga akhir tahun 2003 lalu mencapai 1.039.827 orang yang terdiri dari wanita 516.546 orang dan laki-laki 523.281 orang. Pada tahun 2000 jumlah penduduk kabupaten Jepara sebanyak 970.954 jiwa dan pada tahun 2001 meningkat menjadi 976.767 jiwa atau meningkat sebesar 0,6%. Seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.2**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara**  
**Tahun 1983 – 2003**

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)
1993	821.885
1994	826.928
1995	835.007
1996	911.973
1997	926.838
1998	941.394
1999	957.299
2000	968.963
2001	984.773
2002	1.002.381
2003	1.034.799

*Sumber : BPS Kabupaten Jepara*

Variabel Jumlah penduduk sangat berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan asli daerah Kabupaten Jepara. Hal ini terlihat pada tingkat pengangguran yang sangat minim yang terjadi di Kabupaten Jepara, yang disebabkan dengan banyaknya industri kerajinan mebel ukir yang telah menyerap banyak tenaga kerja, sehingga pengangguran di Kabupaten Jepara dapat teratasi.

### **3. PDRB Perkapita**

PDRB Perkapita merupakan tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Jepara pada tahun tertentu. PDRB Perkapita Kabupaten Jepara terus mengalami kenaikan. Pada tabel 5.3, pada tahun 2000 PDRB Perkapita

sebesar 989.279,7 rupiah. Pada tahun 2001 PDRB Perkapita Kabupaten Jepara sebesar 1.026.736,0 rupiah atau meningkat sebesar 3,8%.

Tabel 5.3  
Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Jepara  
Tahun 1993 – 2002

Tahun	PDRB Perkapita (rupiah)
1993	727.774,0
1994	778.996,0
1995	838.929,3
1996	900.287,6
1997	939.091,1
1998	939.352,2
1999	945.638,8
2000	989.279,7
2001	1.026.736,0
2002	1.064.588,0
2003	1.103.112,0

Sumber : BPS Kabupaten Jepara

#### 4. Pelayanan Kesehatan

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan *pelayanan kesehatan* adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan dan Rumah Sakit umum Daerah. Pada tahun 1998 Jumlah Pelayanan Kesehatan sebesar 78 unit. Dan pada tahun 1999 Jumlah Pelayanan Kesehatan berjumlah 80 unit atau meningkat 2 unit pada tahun sebelumnya. Tetapi pada tahun 2000 – sekarang Jumlah Pelayanan Kesehatan tidak mengalami peningkatan (tetap). Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.4  
Jumlah Pelayanan Kesehatan  
Tahun 1993 – 2003

Tahun	Jumlah Pelayanan Kesehatan (Unit)
1993	72
1994	73
1995	73
1996	74
1997	77
1998	78
1999	80
2000	80
2001	80
2002	80
2003	80

Sumber : BPS Kabupaten Jepara

## 5. Tingkat Laju Inflasi

Tabel 5.5  
Tingkat Laju Inflasi  
Tahun 1993 – 2003

Tahun	Inflasi (%)
1993	10.09
1994	9.53
1995	9.46
1996	8.08
1997	11.27
1998	69.20
1999	8.47
2000	13.18
2001	13.75
2002	9.51
2003	5.88

Sumber : BPS Kabupaten Jepara

Inflasi tertinggi di Kabupaten Jepara yaitu pada tahun 1998 sebesar 69.20%. Dan pada tahun 1999 Inflasi Kabupaten Jepara sebesar 8.47%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dapat menekan laju inflasi yang timbul di Kabupaten Jepara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

## **B. Analisis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini mengambil tempat di wilayah Kabupaten Jepara dengan kurun waktu 1983 – 2003 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita, Jumlah Pelayanan Kesehatan (Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan dan Rumah Sakit umum Daerah) dan Tingkat Laju Inflasi. Kemudian dibahas mengenai hasil analisis regresi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara.

Tabel 5.6  
PAD, Jumlah Penduduk., PDRB Perkapita, Jumlah Pelayanan Kesehatan,  
Laju Inflasi.

Tahun	Y (Rupiah)	X1 (Jiwa)	X2 (Rupiah)	X3 (Unit)	X4 (%)
1983	352.069.532,2	716.915	414.884,5	47	5,67
1984	483.151.875,0	723.658	441.454,0	48	6,34
1985	604.851.784,6	731.281	466.671,8	50	6,70
1986	642.544.513,6	743.696	479.402,9	51	6,97
1987	806.817.764,3	754.506	512.678,4	54	8,21
1988	1.102.675.526,0	764.894	546.352,9	57	7,89
1989	1.469.594.873,0	771.503	566.775,3	64	8,14
1990	2.020.003.724,0	776.096	600.086,1	68	9,30
1991	2.146.191.422,0	809.268	634.034,7	70	8,21
1992	2.592.672.476,0	816.210	675.530,8	72	8,44
1993	3.182.582.073,3	821.885	727.774,0	72	10,09
1994	3.969.947.989,0	826.928	778.996,0	73	9,53
1995	4.962.864.210,0	835.007	838.929,3	73	9,46
1996	8.996.357.782,0	911.973	900.287,6	74	8,08
1997	11.061.167.792,0	926.838	939.091,1	77	11,27
1998	12.715.348.424,0	941.946	939.352,2	78	69,20
1999	16.774.290.465,0	957.299	945.638,8	80	8,47
2000	19.970.486.166,0	968.963	989.279,7	80	13,18
2001	23.099.327.976,0	984.773	1.026.736,0	80	13,75
2002	31.411.747.990,0	1.002.381	1.064.588,0	80	9,51
2003	43.740.237.824,0	1.034.799	1.103.112,0	80	5,88

Sumber : BPS Kabupaten Jepara

Keterangan:

Y : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X1 : Jumlah Penduduk

X2 : Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

X3 : Jumlah Pelayanan Kesehatan

X4 : Laju Inflasi

Hasil analisis dengan menggunakan program E-Views dari data diatas :

Tabel 5.7  
Hasil Analisis Regresi Pendapatan Asli Daerah (Y)

Dependent Variable: LOG(Y)  
Method: Least Squares  
Sample: 1983 2003  
Included observations: 21

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-104.1778	8.071591	-12.90673	0.0000
LOG(X1)	7.611305	0.992622	7.667882	0.0000
LOG(X2)	1.397889	0.549994	2.541646	0.0218
LOG(X3)	0.877174	0.476713	1.840048	0.0844
LOG(X4)	-0.072477	0.052789	-1.372948	0.1887

Sumber : Analisa data dengan program E-views

R-squared = 0.9958393

F-statistik = 957.3775

Durbin-Watson = 1.5628391

Berdasarkan hasil tersebut diatas diperoleh persamaan regresi dengan menggunakan regresi non linear sebagai berikut :

$$\text{Log Y} = -104.1778 + 7.611305 \text{ Log X1} + 1.397889 \text{ Log X2} + 0.877174 \text{ Log X3} - 0.072477 \text{ Log X4}$$

#### a) Uji Statistik

Uji statistik didasarkan pada teori statistik yang meliputi uji t, uji F, koefisien determinasi ( $R^2$ ).

##### 1. Uji t

Uji-t adalah uji yang dilakukan secara individual untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independen (Jumlah Penduduk, PDRB

Perkapita, Jumlah Pelayanan Kesehatan dan Inflasi) terhadap variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara).

Koefisien-koefisien regresi yang didapat pada tabel 5.2. perlu diuji tingkat signifikansinya dan dilakukan uji-t, dengan langkah-langkah :

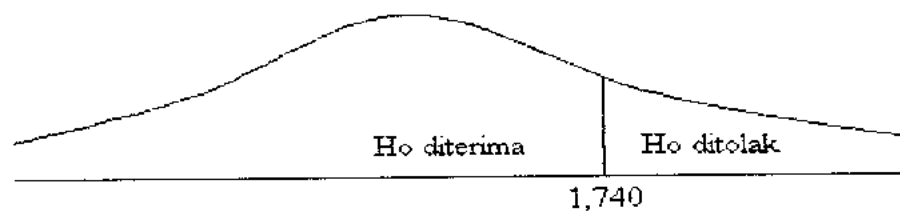
➤ Menentukan hipotesis

$H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 = 0$  (koefisien regresi tidak signifikan)

$H_a : \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 \neq 0$  (koefisien regresi signifikan)

➤ Menentukan t-hitung, dimana t-hitung diperoleh dari hasil estimasi regresi

➤ Kemudian dilakukan uji satu sisi dengan derajat signifikansi 5%, pada derajat kebebasan (DF) =  $n - k = 21 - 4 = 17$  didapat t tabel sebesar 1,740 untuk variabel Jumlah Penduduk (X1), PDRB Perkapita (X2), Jumlah Pelayanan Kesehatan (X3) dan Tingkat Laju Inflasi . Untuk lebih jelasnya disajikan pada gambar 5.1



Gambar 5.1.  
Pengujian untuk Uji-t ( $\alpha = 5\%$ )

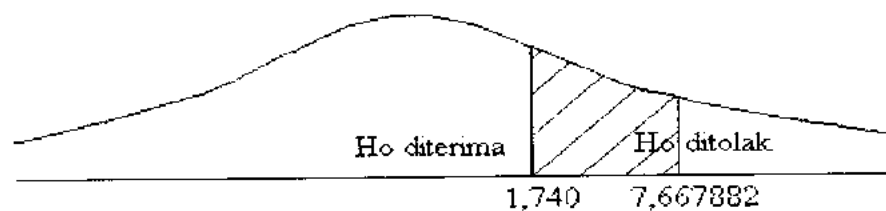


Kriteria pengujian :

- i) Jika  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak artinya masing-masing variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
- ii) Jika  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel variabel dependen secara signifikan.

Berdasarkan tabel 5.7, maka :

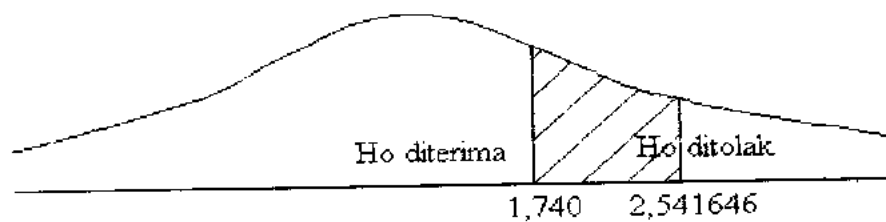
- a. Nilai  $t$ -hitung dari variabel Jumlah Penduduki ( $X_1$ ) pada tabel 5.7 adalah sebesar 7.667882 sedangkan nilai  $t$ -tabel adalah 1,740. Karena  $t$ -hitung  $>$   $t$ -tabel maka  $H_0$  ditolak. Hal ini menunjukkan secara individu bahwa variabel Jumlah Penduduk mempunyai pengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara pada derajat signifikansi 5%. Untuk lebih jelasnya disajikan pada gambar 5.3



Gambar 5.3  
Pengujian Tingkat Jumlah Penduduk

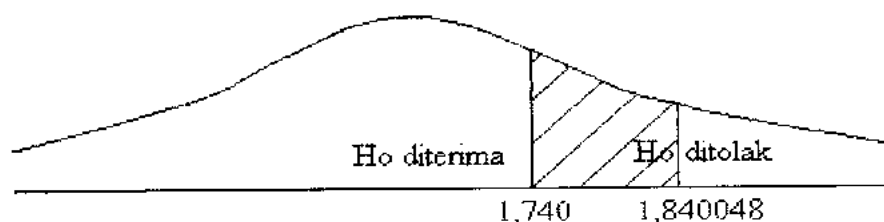
- b. Nilai  $t$ -hitung dari variabel PDRB Perkapita ( $X_2$ ) pada tabel 5.7. adalah sebesar 2.541646, sedangkan nilai  $t$ -tabel 1,740. Karena  $t$ -hitung  $>$   $t$ -

tabel, maka  $H_0$  ditolak. Hal ini menunjukkan secara individu bahwa variabel PDRB Perkapita mempunyai pengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara pada derajat signifikansi 5%. Untuk lebih jelasnya disajikan pada gambar 5.4.



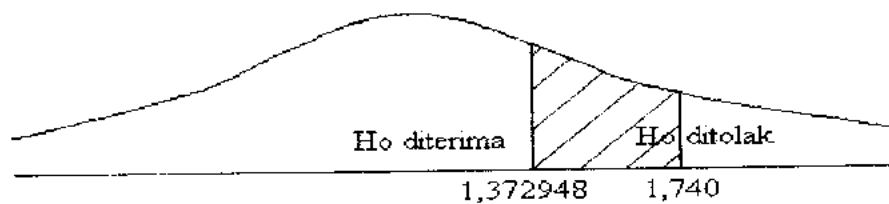
Gambar 5.4  
Pengujian Tingkat PDRB Perkapita

- c. Nilai t-hitung dari variabel Jumlah Pelayanan Kesehatan ( $X_3$ ) pada tabel 5.7. adalah sebesar 1.840048 sedangkan nilai t-tabel 1,740. Karena  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak. Hal ini menunjukkan secara individu bahwa Jumlah Pelayanan Kesehatan mempunyai pengaruh yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara pada derajat signifikansi 5 %. Untuk lebih jelasnya disajikan pada gambar 5.5



Gambar 5.5  
Pengujian Tingkat Pelayanan Kesehatan

- d. Nilai t-hitung dari variabel Tingkat Laju Inflasi pada tabel 5.7. adalah sebesar  $|-1.372948|$ , sedangkan nilai t-tabel 1,333. karena t-hitung < t-tabel, maka  $H_0$  terima. Hal ini menunjukkan secara individu bahwa variabel Laju Inflasi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara pada derajat signifikansi 10%. Untuk lebih jelasnya disajikan pada gambar 5.6



Gambar 5.6  
Pengujian Tingkat Laju Inflasi

## 2. Uji F

Tujuan dilakukan uji-F adalah untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. Langkah-langkah dalam uji F adalah sebagai berikut :

- Menentukan Hipotesis :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$$

- Melakukan penghitungan nilai F hitung :

$$* F \text{ tabel} \rightarrow F_{\alpha; (n-k); (k-1)}$$

Dimana :

$\alpha$  = derajat signifikansi

$n$  = jumlah data

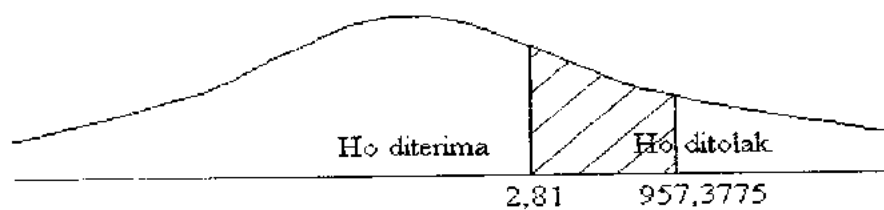
$k$  = jumlah parameter dalam model termasuk konstanta

\*  $F$  hitung -  $F$  statistik

Apabila  $F_{hit} < F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Maka dapat dikatakan bahwa secara statistik semua koefisien regresi secara bersama-sama tidak signifikan pada taraf  $\alpha$ .

Apabila  $F_{hit} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa secara statistik semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu  $Y$

- Menentukan tingkat signifikansi 5 %, pada derajat kebebasan (DF) = 17 didapat  $F$ -tabel sebesar 2,81 sedangkan  $F$ -hitung sebesar 957,3775. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5.7.



Gambar 5.7  
Pengujian Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

Kriteria pengujian :

- Jika nilai  $F$ -hitung  $<$   $F$ -tabel, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Artinya variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

- Jika nilai  $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Berdasarkan hasil analisa data diperoleh nilai  $F\text{-hitung}$  sebesar 957.3775 dengan derajat signifikansi 5%, sedangkan  $F\text{-tabel}$  sebesar 2,81. Maka,  $F\text{-hitung}$  lebih besar dari  $F\text{-tabel}$  yang berarti secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen yang terdiri dari Jumlah Penduduk, PDRB Perkapita, Jumlah Pelayanan Kesehatan dan Inflasi, terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara.

### 3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengukur besarnya proporsi variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nilai  $R^2$  pada estimasi model regresi ini sebesar 0,9958393 artinya bahwa 99,58% variabel Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Jepara dipengaruhi oleh variabel Jumlah Penduduk, PDRB Perkapita, Jumlah Pelayanan Kesehatan dan Inflasi. Sedangkan sisanya 0,42% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

#### b) Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik meliputi uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

## 1. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah keadaan dimana satu atau lebih variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi dari variabel independen lainnya atau dengan kata lain satu atau lebih variabel independennya merupakan suatu fungsi dari variabel-variabel independen yang lainnya. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinearitas, yaitu dengan membandingkan nilai ( $r^2$ )  $X_1, X_2, X_3, X_4$ . Jika hasilnya nilai  $R^2 > (r^2)$  berarti tidak ada gejala multikolinearitas dan sebaliknya jika  $R^2 < (r^2)$  berarti terjadi multikolinearitas (Damodar Gujarati, 1993 : 167).

Tabel 5.8  
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	$r^2$	$R^2$
LOG(X1)	0,958397	0,995839
LOG(X2)	0,981275	0,995839
LOG(X3)	0,929667	0,995839
LOG(X4)	0,189933	0,995839

Sumber : Analisa data dengan program E-views

Berdasarkan tabel 5.8 dapat dilihat bahwa koefisien determinasi parsial ( $r^2$ ) dari variabel-variabel independen lebih kecil dari koefisien determinasi berganda  $R^2$ . Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas.

## 2. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi jika gangguan muncul dalam fungsi regresi yang mempunyai varian yang tidak sama sehingga penaksir OLS tidak efisien baik

dalam sampel kecil maupun sampel besar (tapi masih tetap tidak bias dan konsisten).

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam model, salah satu caranya adalah dengan menggunakan *uji park*. Yang caranya sebagai berikut :

- i Melakukan regresi dengan menggunakan model empiris
- ii Dari hasil regresi tersebut (i) akan diperoleh nilai residualnya
- iii Nilai residual tersebut dikuadratkan atau dimutlakkan, lalu diregresi dengan variabel bebasnya sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\text{Log } Y_1 = \beta_0 + \beta_1 \text{Log } X_1 + \beta_2 \text{Log } X_2 + \beta_3 \text{Log } X_3 + \beta_4 \text{Log } X_4$$

- iv. Hasil regresi tahap kedua dilakukan uji t

Jika hasilnya signifikan, maka terjadi masalah heteroskedastisitas.

Sedangkan jika tidak signifikan, maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

Tabel 5.9  
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	t-Statistik	t-tabel
LOG(X1)	0.130798	1,740
LOG(X2)	-1.412957	1,740
LOG(X3)	1.532138	1,740
LOG(X4)	0.816347	1,333

Sumber : Analisa data dengan program E-views

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tingkat  $\alpha=5\%$  semua koefisien regresi tidak signifikan yang berarti tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam model tersebut.

### 3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah adanya korelasi antara variabel gangguan sehingga penaksir tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun dalam sampel besar. Atau dapat juga dikatakan terjadinya korelasi serial diantara error term variabel pengganggu serangkaian sampel dalam suatu model. Salah satu pengujian terhadap gejala autokorelasi dilakukan dengan menggunakan angka *Durbin-Watson*. Kemudian dibandingkan dengan angka DW dalam tabel dengan  $\alpha$  tertentu. Angka dalam tabel menunjukkan nilai distribusi antara batas bawah dan batas atas.

Berdasarkan hasil analisa data dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson adalah sebesar 1,562839 pada tingkat signifikansi 5% ( $n = 21$ ,  $k = 4$ ), maka diperoleh nilai  $d_l = 0,78$  dan  $d_u = 1,90$  sehingga dapat dilakukan pengujian sebagai berikut (Damodar Gujarati, 1993 : 216 – 218) :

- $H_0$  ditolak jika  $d < d_l$  dan  $d > 4 - d_l$  dan  $H_a$  diterima jika  $d < d_l$  dan  $d > 4 - d_l$
- $H_0$  di terima jika  $d > d_u$  dan  $d < 4 - d_u$  dan  $H_a$  ditolak jika  $d > d_u$  dan  $d < 4 - d_u$
- $H_0$  dan  $H_a$  berada pada ketidakpastian jika  $d_l \leq d < d_u$  dan  $4 - d_u < d \leq 4 - d_l$

	Menolak $H_0$ bukti Autokorelasi	Dacrah keraguan	Mencrima $H_0$ tidak ada Autokorelasi	Daerah keraguan	Menolak $H_0$ bukti Autokorelasi		
	$d_l$		$d_u$	$4 - d_u$	$4 - d_l$		
0	0,78	1,562839	1,90	2	2,10	3,22	4



Dari grafik tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengujian terhadap autokorelasi berada pada daerah keragu-raguan sehingga tidak terdapat masalah besar untuk autokorelasi.

### c) Interpretasi Koefisien Regresi

Berdasarkan tabel 5.7, maka hasil koefisien regresinya dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Koefisien regresi variabel Jumlah Penduduk sebesar 7,611305. Hal ini menunjukkan apabila Jumlah Penduduk meningkat 1%, maka Pendapatan asli Daerah Kabupaten Jepara akan mengalami kenaikan sebesar 7,61 % dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.
2. Koefisien regresi variabel PDRB Perkapita sebesar 1,397889. Hal ini berarti jika PDRB Perkapita meningkat sebesar 1%, maka Pendapatan asli Daerah Kabupaten Jepara akan meningkat sebesar 1,40 % dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.
3. Koefisien regresi Jumlah Pelayanan Kesehatan sebesar 0,877174. Hal ini berarti jika Jumlah Pelayanan kesehatan naik sebanyak 1%, maka Pendapatan asli Daerah Kabupaten Jepara meningkat sebesar 0,88 % dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.
4. Koefisien regresi variabel Inflasi sebesar -0,072477. Hal ini berarti jika Inflasi turun sebesar 1%, maka Pendapatan asli Daerah Kabupaten Jepara akan naik sebesar 0,07 % dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN**

Pada bab ini akan disajikan kesimpulan-kesimpulan sehubungan dengan analisis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, kemudian dari kesimpulan tersebut akan disajikan beberapa Implikasi Kebijakan yang diajukan kepada Pemerintah daerah Kabupaten Jepara guna pemecahan masalah.

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis pada Bab V tentang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara periode 1983 - 2003 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel-variabel bebas yang diperoleh dianggap berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara. Ini dapat dilihat dengan menggunakan analisis regresi dengan cara melihat besarnya hasil  $R^2$ . Hasil regresi diperoleh nilai  $R^2$  sebesar 0,995839. Ini menunjukkan bahwa variabel dependen dipengaruhi oleh variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 99,58%.
2. Berdasarkan uji F diatas maka, secara bersama-sama variabel independen (Jumlah Penduduk, PDRB Perkapita, Jumlah Pelayanan Kesehatan dan Inflasi) berpengaruh dan signifikan terhadap variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara).

3. Berdasarkan uji-t maka :
  - a. Variabel Jumlah Penduduk, PDRB Perkapita secara individual berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara dengan taraf/tingkat kesalahan 5%.
  - b. Variabel PDRB Perkapita secara individual berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara dengan taraf/tingkat kesalahan 5%.
  - c. Variabel Jumlah Pelayanan Kesehatan secara individual berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara dengan taraf/tingkat kesalahan 5%.
  - d. Variabel laju inflasi secara individual berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara dengan taraf/tingkat kesalahan 10%.
4. Hasil uji asumsi klasik, dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya penyimpangan dari uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Dengan demikian data serta kesimpulan dari penelitian ini dikatakan valid secara statistik.

## **B. Implikasi Kebijakan**

Dari hasil analisis data, maka implikasi kebijakan yang dapat diberikan dari penelitian ini kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara adalah :

- I. Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara harus dapat mengupayakan Pendapatan perkapita masyarakat setempat melalui penciptaan lapangan

kerja serta peningkatan upah minimum regional (UMR). Sebab kombinasi antara Jumlah Penduduk dan PDRB Perkapita berpotensi sangat besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara.

2. Pengembangan serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Jepara. Karena dari jumlah Pelayanan Kesehatan yang ada telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara, itu terlihat dengan besarnya retribusi dari sektor pelayanan kesehatan di Kabupaten Jepara.